

**Fungsi Kehumasan Dalam Pelaksanaan Program “Revitalisasi dan Aktualisasi
Nilai-nilai Pancasila” Pada Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung Tahun 2023**

(Tugas Akhir)

Oleh : Moch. Agil Pamungkas

2006071006



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

FUNGSI KEHUMASAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM “REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA” PADA BADAN KESBANGPOL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

Oleh

Moch. Agil Pamungkas

Penelitian ini membahas mengenai fungsi kehumasan dalam pelaksanaan program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila” pada badan KESBANGPOL Provinsi Lampung. Melalui wawancara dengan informan-informan yang terlibat, penulis mengidentifikasi beberapa bentuk fungsi kehumasan yang dilakukan oleh bagian bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa badan KESBANGPOL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan KESBANGPOL Provinsi Lampung tetap menjalankan fungsi kehumasan meskipun tidak terdapat divisi khusus kehumasan di dalamnya. Tindakan tersebut meliputi penyedia informasi kepada publik tentang Badan KESBANGPOL, komunikasi dua arah yang memfasilitasi pemahaman dan dukungan publik terhadap Badan KESBANGPOL, melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemilihan program komunikasi yang sesuai dengan Badan KESBANGPOL, serta program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila”.

Bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa berperan sebagai pelaksana dan penggagas program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila” serta pihak yang bertanggung jawab atas terselenggaranya program tersebut. Bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa dalam hal ini menyelenggarakan program tersebut dengan melakukan beberapa fungsi kehumasan meskipun tanpa adanya divisi khusus kehumasan.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan fungsi kehumasan tanpa adanya divisi khusus kehumasan pada badan KESBANGPOL Provinsi Lampung dalam program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila” dan menjelaskan seperti apa kekurangan penerapan fungsi kehumasan dalam program tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi kehumasan tetap dijalankan tetapi tidak memperhatikan berbagai teori kehumasan karena ketiadaan divisi khusus kehumasan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung untuk menambahkan divisi khusus kehumasan dalam salah satu bidangnya.

Kata kunci: Fungsi Kehumasan, Humas, “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila

Fungsi Kehumasan Dalam Pelaksanaan Program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila” Pada Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung Tahun 2023

Oleh :

Moch. Agil Pamungkas

Tugas Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA (A.Md.)

Pada

Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**DIPLOMA III HUBUNGAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Tugas Akhir : Fungsi Kehumasan Dalam Pelaksanaan Program
"Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila"
Pada Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung
Tahun 2023

Nama Mahasiswa : **Moch. Agil Pamungkas**

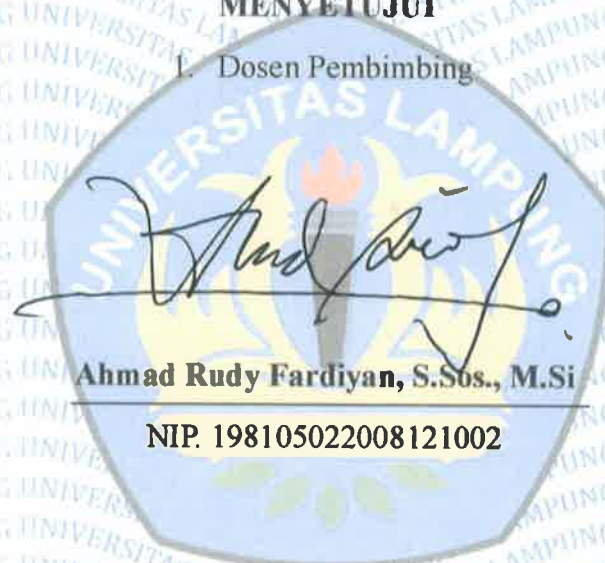
Nomor Pokok Mahasiswa : 2006071006

Program Studi : D III Hubungan Masyarakat

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Dosen Pembimbing



Ahmad Rudy Fardiyan, S.Sos., M.Si

NIP. 198105022008121002

2. Ketua Program Studi

Diploma III Hubungan Masyarakat



Dr. Ibrahim Besar, S.Sos., M.Si

NIP. 196803212002121001

HALAMAN PENGESAHAN

1. Penguji Tugas Akhir



Ahmad Riza Faizal, S.Sos., IMDLL.

NIP. 198009292005011002

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Tugas Akhir : 09 Agustus 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Moch. Agil Pamungkas
Nomor Pokok Mahasiswa : 2006071006
Program Studi : DIII Hubungan Masyarakat
Alamat : Jl. Pala No. 102, Iringmulyo, Metro Timur,
Kota Metro Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul "**Fungsi Kehumasan Dalam Pelaksanaan Program "Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila" Pada Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung" Tahun 2023**" merupakan hasil kerja saya sendiri dan bukan hasil plagiarisme atau buatan orang lain. Jika di kemudian hari ada pihak yang merasa dirugikan atau mengajukan keberatan, saya siap untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sadar, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2024

Hormat Saya,



Moch. Agil Pamungkas

NPM 2006071006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Moch. Agil Pamungkas yang biasa dipanggil Agil lahir di Kota Metro Lampung pada tanggal 09 September 2002 merupakan anak keempat dari lima bersaudara yang merupakan putra dari pasangan Bapak Mispani Ramli dan Ibu Siti Hamadah.

Jenjang pendidikan penulis bermula dari TK Bhayangkari Kota Metro pada tahun 2007, lalu duduk dibangku Sekolah Dasar di SD Pertiwi Teladan, Metro Lampung pada tahun 2007 sampai tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 4 Metro Lampung pada tahun 2014 sampai tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 3 Metro Lampung pada tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun 2020, penulis melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi dan tercatat di salah satu Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Lampung (UNILA) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan konsentrasi jurusan Ilmu Komunikasi Program Studi D3 Humas Melalui Jalur Vokasi.

MOTTO

**“Jadilah Seperti Bunga Yang Memberikan Keharuman Bahkan ke Tangan Yang
Menghancurkannya”**

“Balas Dendam Terbaik Adalah Menjadikan Dirimu Lebih Baik”

**“Jangan katakan pada Allah aku punya masalah besar, tapi katakan pada masalah,
aku punya Allah yang Maha Besar”**

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada mereka yang sangat berarti dalam hidup saya sampai saya menuntaskan pendidikan di Universitas Lampung :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberi kemudahan dan kelancaran kepada hambanya, dan selalu memberi nikmat yang tak ternilai.
2. Untuk kedua orang tuaku, Bapak Mispani Ramli & Ibu Siti Hamadah yang selalu mendukungku dalam segala hal dan mendoakan setiap langkahku agar aku menjadi manusia yang baik.
3. Untuk kakak-kakak ku yaitu kak Anailil Fasikhah, Fanny Zakiyah, Chania Rahmah, dan adik ku Anisa Faradiba yang selalu memberikan dukungan dan motivasi agar aku terus semangat untuk mengejar cita-citaku.
4. Kepada keluarga besarku yang senantiasa mendukung dan mendoakan.
5. Untuk sahabat seperjuanganku, Public Relations 2020 dan semua teman-teman yang selalu mendoakan.

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Tugas Akhir dengan judul **“Fungsi Kehumasan Dalam Pelaksanaan Program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila” Pada Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung” Tahun 2023** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Ilmu Komunikasi pada program studi Diploma Hubungan Masyarakat di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. Bapak Ibrahim Besar, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Lampung.
4. Bapak Ahmad Rudy Fardiyani, S.Sos, M.Si selaku pembimbing tugas akhir yang dengan penuh kesabaran telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingannya dan pengarahan dalam menyusun tugas akhir ini.
5. Bapak Ahmad Riza Faizal, S.sos, IMDL.L selaku penguji yang meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan saran dalam tugas akhir ini.
6. Ibu Fri Rejeki Noveira, S.Kom, M.Si. selaku Pembimbing Akademik selama saya berkuliah di D3 Hubungan Masyarakat.
7. Seluruh dosen pengajar Program Studi Hubungan Masyarakat Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama di bangku perkuliahan. Serta seluruh staf atau karyawan yang telah membantu menyelesaikan administrasi.

8. Seluruh staf Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung khususnya Administrasi, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Bapak Saprul Al Hadi, Fardi Nansyah, dan Fajar Wahyudi yang telah berkenan memberikan informasi dan data untuk kebutuhan penulis, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Public Relations 2020 khususnya Nafa Fadilah, Vicky Permata Safitri, R.A Prawira Fasya, M. Daffa Khazzimi, Yosafat Aditya, Febyola Rosheni Soedjadi Sidauruk, Yogi Firmansyah, dan Ricky William yang selalu membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan perhatiannya untuk saya yaitu Fadhilah Anas Saabirin, Mirza Ristandi, Rizal Jery Andriansyah, Anggara Saputra, dan Roni Rivando.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan penulisan	4
1.4 Manfaat penulisan	4
1.5 Metode pengumpulan data	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Hubungan Masyarakat	6
2.1.1 Humas Pemerintah	7
2.1.2 Fungsi Kehumasan	8
2.1.3 Strategi Humas	8
2.1.4 Program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila”	11
BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI	14
3.1 Gambaran Umum Instansi Pemerintahan	14
3.1.1 Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	14
3.1.2 Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung ...	17
3.2 Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	18
3.3 Logo Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	19
3.3.1. Arti warna dan logo Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	19
3.4 Lokasi.....	21
3.4.1. Gambaran Umum Bagian Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.....	21
3.4.2. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	24
4.1 Hasil	24
4.1.1 Fungsi kehumasan yang dijalankan Badan KESBANGPOL.....	24
4.1.2 Program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila”	28
4.1.3 Ketidadaan Divisi Humas	31
4.2 Pembahasan.....	32
4.2.1 Penerapan Fungsi Kehumasan Dalam Program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila”	33

4.2.2 Kekurangan Penerapan Fungsi Kehumasan Pada Program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila” Tanpa Adanya Divisi Khusus Kehumasan	34
BAB V PENUTUP.....	37
5.1 Kesimpulan	37
5.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 logo Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	19
Gambar 3.2 Kantor KESBANGPOL Provinsi Lampung	21
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	23
Gambar 4.1 Media Sosial Instagram Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung	25
Gambar 4.2 Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama Oleh Badan KESBANGPOL	26
Gambar 4.3 Pengukuhan Pengurus FPK Provinsi Lampung Oleh Badan KESBANGPOL	27
Gambar 4.4 Program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila” Oleh Badan KESBANGPOL	28
Gambar 4.5 Kegiatan Pengukuhan FPK Provinsi Lampung	29
Gambar 4.6 Kegiatan Penyuluhan (ATHG) Terhadap Bahaya Radikalisme	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fungsi kehumasan, atau sering disebut juga sebagai fungsi Public Relations (PR), adalah proses komunikasi yang dirancang untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif antara suatu instansi atau perusahaan dengan publiknya, termasuk karyawan, pelanggan, pemegang saham, masyarakat umum, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Menurut Scott M. Cutlip fungsi kehumasan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Manajemen Hubungan: Humas bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik antara organisasi dan berbagai pihak yang berkepentingan. Ini melibatkan membangun kepercayaan, mengelola konflik, dan merespons kebutuhan dan kepentingan publik.

Penyedia Bantuan Manajemen: Humas juga memberikan bantuan kepada manajemen dalam pengambilan keputusan yang memperhitungkan kepentingan publik. Mereka membantu manajemen memahami pandangan dan kebutuhan publik, serta memberikan saran tentang bagaimana cara terbaik untuk berkomunikasi dengan publik.

Pengembangan Kepemimpinan: Fungsi kehumasan juga mencakup pengembangan kepemimpinan organisasi dalam hal komunikasi. Ini melibatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan komunikasi bagi para pemimpin organisasi agar mereka dapat menjadi pembawa pesan yang efektif dan membangun hubungan yang baik dengan publik.

Manajemen Krisis: Ketika terjadi krisis atau situasi yang mempengaruhi citra atau reputasi organisasi, Humas bertanggung jawab untuk merespons dengan cepat dan efektif. Mereka membantu organisasi dalam mengelola krisis dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap citra dan reputasi organisasi.

Badan KESBANGPOL, singkatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebuah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengelola berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa serta pengelolaan politik.

Fungsi Badan KESBANGPOL yakni seperti berikut :

Penanggulangan Konflik Sosial: KESBANGPOL terlibat dalam upaya penanggulangan konflik sosial, baik itu konflik antarindividu, kelompok, atau komunitas. Mereka bekerja untuk mencegah timbulnya konflik, menengahi konflik yang sedang berlangsung, dan memfasilitasi rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bersengketa.

Pemberdayaan Masyarakat: Salah satu fungsi KESBANGPOL adalah memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan. Ini dilakukan dengan memberikan dukungan dan sumber daya kepada masyarakat untuk meningkatkan kemandirian, partisipasi, dan kesetaraan dalam kehidupan sosial dan politik.

Pendidikan Politik: KESBANGPOL berperan dalam menyediakan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, proses politik, dan nilai-nilai demokratis lainnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan negara.

Melalui fungsi-fungsi yang disebutkan di atas, kehumasan dalam Badan KESBANGPOL memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta mengelola dinamika politik yang ada dalam masyarakat.

Dari fungsi-fungsi yang telah dijelaskan. Fungsi kehumasan dengan KESBANGPOL menghasilkan kesesuaian antar fungsi yang membuat fungsi dari KESBANGPOL dapat tercapai dengan terstruktur dan lebih efektif hasil yang diinginkan nantinya. Contohnya adalah fungsi dari Badan KESBANGPOL yaitu penanggulangan konflik sosial dengan menggunakan fungsi kehumasan

manajemen krisis akan menghasilkan proses penanggulangan konflik sosial yang terukur dan dampak negatif yang dapat diminimalisir.

Pada Badan KESBANGPOL tidak ada divisi khusus Humas yang berperan aktif menjaga citra baik organisasi. Alasan tidak adanya divisi Humas karena Badan KESBANGPOL menggunakan pendekatan komunikasi alternatif dalam menjalankan fungsinya, seperti hanya mengandalkan media sosial, pertemuan langsung, atau kerjasama dengan media massa, tanpa harus membentuk divisi humas terpisah. Selain itu kebijakan atau kebiasaan organisasi KESBANGPOL tidak mendorong pembentukan divisi humas karena kurangnya pemahaman akan pentingnya komunikasi formal atau kurangnya dukungan dari manajemen senior. Struktur organisasi KESBANGPOL dan budaya organisasi tidak memungkinkan adanya divisi humas. Mereka cenderung untuk mengintegrasikan fungsi komunikasi ke dalam tanggung jawab yang ada daripada membentuk divisi terpisah.

Meski begitu, mereka tetap melakukan fungsi kehumasan dalam melakukan komunikasi seperti memastikan transparansi, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui pelatihan personel, kerjasama dengan lembaga-lembaga eksternal, atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Oleh sebab itu, pada bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan KESBANGPOL melakukan program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila” di Provinsi Lampung sebagai media penyalur dan kontrol informasi mengenai Nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat Provinsi Lampung, supaya pemahaman akan pentingnya Nilai-nilai Pancasila dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan menjaga keutuhan NKRI. Maka dari itu fungsi kehumasan berperan sangat penting selama program tersebut berjalan agar setiap poin dari program tersebut dapat digunakan dengan maksimal menggunakan berbagai fungsi kehumasan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan implementasi lebih mengenai “ **Fungsi Kehumasan Dalam Pelaksanaan Program “Revitalisasi**

dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila” Pada Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung Tahun 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ingin penulis kaji adalah bagaimana fungsi kehumasan diterapkan dalam program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila” ?

1.3 Tujuan penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui fungsi kehumasan yang diterapkan dalam program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila”

1.4 Manfaat penulisan

1. Manfaat Akademis

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui pentingnya fungsi kehumasan dalam program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila” yang dilaksanakan oleh Badan KESBANGPOL. Selain itu, juga diharapkan sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa lain.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak Badan KESBANGPOL dalam penerapan fungsi kehumasan.

1.5 Metode pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Teknik Observasi

Metode observasi adalah suatu pengumpulan data melalui pengamatan langsung di tempat kejadian pada objek penulisan yaitu dengan memahami pelaksanaan program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila” di Badan

KESBANGPOL yang langsung penulis lihat dan turut serta dalam program tersebut. Dengan pengamatan yang dilakukan dari 17 Februari s.d 23 Februari 2023, di Lampung Barat selama program kegiatan “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila” ini berlangsung.

2. Teknik Wawancara

Metode wawancara merupakan pengumpulan data dan informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan antara narasumber dengan pewawancara. Dalam teknis pelaksanaannya penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan bebas di mana peneliti hanya menggunakan garis-garis besar yang berkenaan dengan penulisan. Penulis melakukan wawancara dengan pihak KESBANGPOL bagian bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Dengan mewawancarai Bapak Fardi Nansyah selaku sekretaris bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan di KESBANGPOL.

3. Teknik Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi ini digunakan ketika mencari data dari subjek yang berupa tulisan. Dalam teknik dokumentasi, penulis mendapatkan dokumen-dokumen tentang Badan KESBANGPOL. Dengan menggunakan kamera handphone dan juga mengumpulkan beberapa dokumen yang telah disediakan oleh Badan KESBANGPOL.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Masyarakat

Hubungan masyarakat atau Humas merupakan fungsi manajemen dalam sebuah organisasi yang berperan untuk membangun kesepahaman antara organisasi dan publiknya (Berg,2011). Berdasarkan peran yang dimilikinya, humas sebenarnya lebih merupakan aktivitas mengelola arus pesan/komunikasi yang terjadi di institusinya. Manakala pesan itu dapat menjadi *lifeblood* di institusinya, maka upaya untuk membangun *understanding*, *goodwill* dan *image* (citra) dengan para stakeholdernya serta merta akan mudah dicapai (Sinatra,2018).

Fungsi humas dalam pemerintahan adalah membantu menjabarkan dan mencapai tujuan program pemerintahan, meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta memberi publik informasi yang cukup untuk dapat melakukan pengaturan diri sendiri (Lattimore, 2010). Berarti humas pemerintahan bertugas menjalankan kegiatan kebijakan dan pelayanan publik dengan memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat. Selanjutnya memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau publik.

Berarti humas pemerintahan bertugas menjalankan kegiatan kebijakan dan pelayanan publik dengan memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintah yang mengikat rakyat atau masyarakat. Selanjutnya memberikan pelayanan publik terbaik, dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau publik.

2.1.1 Humas Pemerintah

Dalam sebuah organisasi, khususnya di lingkup pemerintahan, humas memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Selain itu, sebagai sebuah kegiatan komunikasi, humas juga berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif dalam kerangka 'winwin solutions', antar berbagai stakeholders organisasi, baik internal maupun eksternal dalam rangka membangun citra dari institusi pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu praktik humas yang paling ideal di dunia pemerintahan adalah berdasarkan model simetris dua arah.

Peranan Humas pemerintah adalah untuk memberikan sanggahan mengenai pemberitaan yang salah dan merugikan pemerintah, dan mengkomunikasikan atau menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membentuk citra positif pemerintah daerah tersebut dimata publiknya. Pentingnya peran Humas instansi dan lembaga perintah dalam masyarakat modern yaitu dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan operasinya di berbagai tempat berbagai bidang. Teknik yang digunakan dalam humas di perintah tidak ada bedanya dengan teknik yang digunakan humas di bidang lain yaitu penyampaian informasi dan komunikasi (Moore, 2004).

Humas dibentuk di lembaga pemerintah diantaranya sebagai juru bicara pemerintah, melakukan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah, melakukan hubungan intern dengan satuan dan unit kerja di lingkungan pemerintah, melaksanakan usaha untuk peningkatan peliputan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan melaksanakan koordinasi/kerja sama dengan organisasi kewartawanan (Moore, 2004). Dengan pelaksanaan peran humas pemerintah, tujuan akhirnya adalah untuk membentuk citra yang positif tentang pemerintah di mata masyarakatnya.

Citra mencerminkan apa yang dipikirkan, emosi dan persepsi individu. Walaupun orang melihat hal yang sama, tapi pandangan mereka bisa berbeda. Persepsi inilah yang membentuk citra dari sebuah organisasi (Alifahmi,

2005). Esensi tujuan humas di dunia pemerintahan adalah membuat berbagai program pemerintah yang dapat membentuk, meningkatkan dan memelihara citra positif dan reputasi baik agar dapat memperoleh opini publik yang menguntungkan, serta dukungan dan simpati rakyat atau publik. Citra sengaja diciptakan Humas dalam dunia pemerintahan dalam bentuk events (kegiatan-kegiatan), kampanye dan program-program (Ardianto, 2011).

Dalam melaksanakan perannya, menurut Lattimore (2010) ada empat model humas yang selalu diterapkan. Pertama, model press agency (agen pemberitaan); yaitu menggambarkan bagaimana informasi bergerak satu arah dari organisasi menuju publik. Kedua, model informasi publik; yaitu model yang menggambarkan bagaimana humas bertugas memberitahu publik. Model ini selalu dipraktikkan oleh humas pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba. Ketiga, model asimetris dua arah; yaitu memandang humas sebagai kerja persuasi ilmiah yang menggunakan hasil riset untuk mengukur dan menilai publik. Keempat, model simetris dua arah; yaitu sebuah model yang menggambarkan sebuah orientasi humas dimana organisasi dan publik saling menyesuaikan diri. Model ini berfokus pada penggunaan metode riset ilmu sosial untuk memperoleh rasa saling pengertian serta komunikasi dua arah antara publik dan organisasi. Dari keempat model tersebut, tiga model pertama merefleksikan sebuah praktik humas yang berusaha mencapai tujuan organisasi melalui persuasi. Model keempat berfokus pada usaha menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan publik atau kelompok lainnya.

2.1.2 Fungsi Kehumasan

Pengertian fungsi kehumasan merujuk pada peran atau tanggung jawab utama departemen atau tim kehumasan dalam sebuah organisasi. Menurut Cutlip, Center, dan Broom (2000): Menyatakan bahwa fungsi kehumasan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program-program komunikasi yang membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membangun hubungan yang baik dengan berbagai publiknya.

Scott M. Cutlip: Mengidentifikasi fungsi kehumasan sebagai berikut:

- Penyedia informasi kepada publik tentang organisasi.
- Komunikasi dua arah yang memfasilitasi pemahaman dan dukungan publik terhadap organisasi.
- Penyedia bantuan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan yang memperhitungkan kepentingan publik.

Sedangkan, menurut Grunig dan Hunt (1984): Menggambarkan fungsi kehumasan sebagai dua aspek utama, yaitu komunikasi simetris dan asimetris. Komunikasi simetris adalah komunikasi dua arah yang memungkinkan organisasi mendengarkan dan merespons secara efektif terhadap publiknya, sementara komunikasi asimetris lebih menekankan pada pengaruh dan persuasi satu arah.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi kehumasan melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari penyediaan informasi kepada publik, komunikasi dua arah untuk membangun hubungan yang baik, pengelolaan persepsi publik, hingga pengaruh dan persuasi untuk memengaruhi opini publik. Tujuan utamanya adalah membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Contohnya bisa diterapkan dalam program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila” yang dilakukan oleh Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung. Supaya tujuan dari program yang dilakukan oleh Badan KESBANGPOL dapat terealisasi secara efisien dan efektif karena menggunakan berbagai teori dan metode yang tersedia.

Kaitan antara humas pemerintah dengan fungsi kehumasan adalah sama sama membantu instansi pemerintahan dalam mencapai tujuan program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila” melalui fokus pada proses komunikasi yang diterapkan. Jadi humas pemerintah dengan menerapkan fungsi kehumasan akan menjadi media penyebar dan kontrol arus informasi terhadap publiknya, baik internal maupun eksternal. Humas pemerintah

merupakan bagian dari fungsi kehumasan yang lebih luas, dengan fokus khusus pada komunikasi antara publik dengan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan informasi, membangun hubungan yang baik, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan.

2.1.3 Strategi Humas

Mengacu kepada pola strategi humas, maka menurut Ahmad S. Adnanputra yang dikutip oleh Ruslan, (2006:134) batasan pengertian tentang strategi humas adalah: “Alternatif optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan humas dalam kerangka suatu rencana humas”. Sebagaimana yang kita ketahui humas bertujuan untuk menegakan dan mengembangkan suatu “citra yang menguntungkan” bagi organisasi atau perusahaan, atau produk barang dan jasa terhadap para stakeholdernya sasaran yang terkait yaitu publik internal dan publik eksternal. Adapun tahap-tahap kegiatan strategi humas:

1. Strategi Operasional

Melalui pelaksanaan program humas yang dilakukan dengan pendekatan kemasyarakatan, melalui mekanisme sosial cultural dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat dari opini publik atau kehendak masyarakat. Artinya humas mutlak bersikap atau berkemampuan untuk mendengar, dan bukan sekedar mendengar mengenai aspirasi yang ada didalam masyarakat yang dianut.

2. Pendekatan Persuasive dan Edukatif

Fungsi humas adalah menciptakan komunikasi dua arah (timbang balik) dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada pihak publiknya yang bersifat mendidik dan memberikan penerangan, maupun dengan melakukan pendekatan persuasif, agar tercipta saling pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi dan lain sebagainya.

3. Pendekatan Tanggung Jawab Sosial Humas

Menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial bahwa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tersebut bukan ditunjukkan untuk mengambil keuntungan sepihak dari publik sasarnya (masyarakat), namun untuk memperoleh keuntungan bersama.

4. Pendekatan kerja sama

Berupa membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan berbagai kalangan, baik hubungan kedalam (internal relations) maupun hubungan keluar (eksternal relations) untuk meningkatkan kerja sama. Humas berkewajiban memasyarakatkan misi instansi yang diwakilinya agar diterima dan mendapat dukungan dari masyarakat, dan untuk memperoleh opini publik serta perubahan sikap yang positif bagi kedua belah pihak (mutual understanding).

Kaitan antara strategi humas dengan fungsi kehumasan (Humas) adalah bahwa strategi humas merupakan rencana atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan menjalankan fungsi-fungsi kehumasan secara efektif. Contohnya melalui program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila.” yang termasuk dalam kegiatan pendekatan komunikasi secara langsung, kegiatan ini merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh Badan KESBANGPOL dalam melakukan langkah komunikasi efektif dengan penerapan strategi humas yang membuat fungsi-fungsi kehumasan menjadi efektif, dengan menyediakan kerangka kerja yang terorganisir dan terarah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.

2.1.4 Program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila”

Program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila” merupakan salah satu strategi humas yang dijalankan oleh Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung. Program ini merupakan program sosialisasi dan penyuluhan tentang Pancasila kepada masyarakat Lampung yang dilakukan dengan cara komunikasi dua arah. Hal ini berkesesuaian dengan pendapat Frida Kusumastuti dalam Yusmawati (2017:3) “Humas adalah aktivitas komunikasi dua arah dengan publik (Perusahaan/organisasi), yang bertujuan untuk

menumbuhkan saling pengertian, saling percaya, dan saling membantu/kerja sama”. Bentuk kegiatan dari program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila” yaitu:

Kampanye Publik dan Sosialisasi: Melakukan kampanye publik dan sosialisasi melalui media massa, media sosial, seminar, diskusi, dan acara-acara publik lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila.

Pembentukan Forum Diskusi dan Dialog Antaragama dan Antarbudaya: Mendorong terbentuknya forum diskusi dan dialog antaragama dan antarbudaya sebagai sarana untuk mempromosikan dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam kerangka nilai-nilai Pancasila.

Pelatihan dan Pembinaan Kepemimpinan Berbasis Pancasila: Mengadakan pelatihan dan pembinaan kepemimpinan yang berbasis nilai-nilai Pancasila bagi pemimpin masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemuda untuk membangun kepemimpinan yang berintegritas, adil, dan bertanggung jawab.

Penyuluhan dan Kampanye Anti-Radikalisme dan Ekstremisme: Melakukan penyuluhan dan kampanye anti-radikalisme dan ekstremisme yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila untuk mencegah penyebaran paham radikal dan ekstrem yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Kemanusiaan dan Sosial: Mendorong dan mendukung kegiatan kemanusiaan dan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap sesama sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan.

Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila dapat diartikan sebagai usaha mengembalikan Pancasila kepada subjeknya yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara. Ideologi Pancasila yang seharusnya dilaksanakan dalam setiap bidang kehidupan (Supriyono & Kusumawati, 2020). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari di kehidupan masyarakat adalah salah satu Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila

mengandung pengertian bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku masyarakat sebagai warga negara. Warga negara harus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kebenaran Pancasila (Anggraeni et al., 2020, p. 16).

Penelitian yang membahas mengenai revitalisasi nilai-nilai Pancasila yang pernah dilakukan adalah penelitian Chairiyah (2014) tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai pendidikan karakter yang hasil penelitiannya adalah Pendidikan karkater di sekolah tidak dapat berjalan tanpa pemahaman yang cukup dan konsisten oleh seluruh *stake holder* sekolah.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Gambaran Umum Instansi Pemerintahan

3.1.1 Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

Pada awalnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung bernama Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung, yang merupakan hasil dari penggabungan Kantor Direktorat Sosial Politik dengan Markas Wilayah Pertahanan Sipil, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas politik masyarakat dan peran politik masyarakat untuk membangun Provinsi Lampung dengan suasana keterbukaan, demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mampu mengantisipasi setiap permasalahan sosial yang timbul.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 tanggal 12 Desember Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, yang merupakan penyempurnaan organisasi dari yang sebelumnya bernama Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas “Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan Bangsa dan Politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”, dan

Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Lampung, serta Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, yang berpedoman kepada Peraturan Gubernur tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Dalam menerapkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Indonesia, para pejabat negara, melalui program pemerintah, membuat lembaga yang memiliki fungsi dan tugas dalam meningkatkan serta mengajari nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia. Dalam memaknai nilai luhur bangsa Indonesia, banyak masyarakat yang kurang memahami makna nilai luhur bangsa, sehingga adanya inisiasi untuk dibentuknya sebuah lembaga bagi masyarakat yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia. di dalam badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah salah satunya adalah Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung (Kesatuan Bangsa dan Politik) yang memiliki fungsi dan tugasnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung No. 56 Tahun 2019 mengenai Perangkat Daerah yang secara singkat berbunyi pada Pasal 919, Badan Kesbangpol mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas Bidang Kesbangpol di wilayah Provinsi Lampung dan Fungsi sebagai Pelaksana Kebijakan, Koordinasi, Pelaksanaan, Fasilitasi pada bidang ideologi Pancasila, Wasbang, Poldagri, Ketahanan Ekosobud, Pembinaan antar suku dsb, serta melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur.. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana arahan Pergub, Badan Kesbangpol Prov. Lampung juga bergerak secara fleksibel dimana dapat melakukan kerjasama antar badan satu dengan badan lainnya agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebagaimana mestinya.

Badan Kesbangpol Provinsi Lampung memiliki banyak visi dan misinya kemudian memiliki bidang-bidang di dalamnya serta juga memiliki peran yang besar terhadap perjuangan ideologi bangsa. Disamping itu Badan Kesbangpol juga memiliki banyak kegiatan yang audience-nya adalah seluruh masyarakat

Indonesia yang diklasifikasi berdasarkan tingkatan dari kegiatan tersebut. Sehingga setiap lapisan masyarakat dapat memaknai nilai-nilai yang terkandung di dalam kegiatan yang telah digaungkan oleh Badan Kesbangpol sesuai dengan kematangan pola pikir masyarakat sehingga tidak terjadi penyimpangan pemaknaan Pancasila, terjadinya separatisme, mencuatnya pemikiran radikal dan gerakan ekstrimisme, dan pola penyimpangan masyarakat atau individu yang dapat mengancam kesatuan NKRI. Kesbangpol tidak bergerak begitu saja, mereka adalah badan yang dinaungi oleh Ditjen Kesbangpol pusat yang memiliki daerah yurisdiksinya masing-masing. badan ini memiliki pedoman, landasan, acuan, yang digabungkan menjadi suatu aturan dengan sedemikian rupa, sehingga hukum yang berlaku lebih efisien, tepat sasaran, hingga membangun karakter Pancasila. Badan ini juga bergerak serta berperan penting dalam mengedukasi masyarakat Indonesia untuk selalu cinta terhadap Indonesia yang dimulai dari gerakan revolusi mental kemudian aktualisasi dan revitalisasi pancasila serta pemahaman mengenai terorisme yang berakar dari radikalisme yang menjuru kepada ekstrimisme di Indonesia. Badan Kesbangpol adalah badan yang menjadi pilar utama dalam meningkatkan rasa cinta masyarakat, perubahan mental masyarakat, dan juga perubahan pola pikir masyarakat terhadap Indonesia.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin cepat serta beriringan dengan teknologi dan informasi yang diakibatkan adanya globalisasi mendorong fleksibilitas batas-batas ruang dan waktu serta mempercepat pertukaran informasi yang beredar, hal ini menjadikan hubungan antar batas wilayah negara sudah tak terelakan lagi. Meskipun banyak hal positif akibat dari peristiwa ini seperti majunya ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, memunculkan peluang bisnis, membuka lapangan pekerjaan baru, dll. Globalisasi juga berpeluang memunculkan beragam informasi-informasi asing yang jika tidak ditelaah secara kritis dan teliti, dapat merambah menjadi pemikiran yang cenderung radikal. Pemikiran Radikalisme ini, lama-kelamaan akan berujung pada tindakan Ekstrimisme yang dapat berujung kepada Terorisme dan bahkan dapat mengancam Kesatuan NKRI. Diperlukannya sebuah Badan yang dapat bertindak sebagai lembaga penanggulangan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya

penyimpangan ideologi masyarakat Indonesia. Badan Kesbangpol Prov Lampung sesuai dengan tupoksi mereka yang telah didasari hukum dari Pergub No. 56 Tahun 2019 dipercayai dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan tupoksi mereka dalam menghadapi penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia.

Penulis memilih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dan kemudian ditempatkan pada Bidang Ideologi, Wawasan Bangsa, dan Bela Negara sebagai tempat pelaksanaan PKL, pada bidang ini, penulis tertarik mengenai Ideologi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan unik dan berbeda ketimbang ideologi dari bangsa lain. Adanya rasa kelestarian terhadap ideologi luhur bangsa Indonesia yang harus disampaikan kepada masyarakat, membuat penulis sadar akan banyaknya ancaman dari ideologi asing yang sejalan dengan jurusan Hubungan Masyarakat serta mata kuliah penulis yakni Humas dan Human Relation serta Komunikasi Organisasi. Yang pada bidang ini penulis dihadapkan dengan isu radikalisme yang condong kepada ekstrimisme, bela negara, ideologi pancasila, dan kewarganegaraan, sehingga sejalan dengan pemahaman penulis mengenai pencegahan pemahaman asing berupa radikalisme yang membuat masyarakat menjadi tak terkendali sehingga dapat mengancam kesatuan dan keutuhan Bangsa Indonesia.

3.1.2 Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung

a. Tugas :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri. Dan
- e. Pelayanan administratif.

3.2 Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

A. Visi

“ RAKYAT LAMPUNG BERJAYA ”

B. Misi

"Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai” dengan cara mewujudkan Provinsi Lampung yang aman dan kondusif serta saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kerangka NKRI".

3.3 Logo Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

Adapun Logo Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sebagai berikut :



Gambar 3.1 logo Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

3.3.1. Arti warna dan logo Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

Secara keseluruhan, Logo / lambang Provinsi Lampung terdiri dari 11 bagian besar yakni Perisai Bersegi Lima, Pita, Aksara Lampung, Daun dan Buah lada, Setangkai Padi, Laduk, Payam, Gung / Gong, Siger, Payung, dan warna yang dipakai dalam logo. Berikut ini penjelasan dari masing-masing bagian tersebut:

1. Perisai Bersegi Lima: Kesanggupan mempertahankan cita dan membina pembangunan rumah-tangga Yang didiami oleh dua unsur golongan masyarakat untuk mencapai masyarakat makmur, adil berdasarkan Pancasila.

2. Pita SAI BUMI RUWAI JURAI: Sai Bumi Rumah tangga agung yang berbilik-bilik. Rua jurai: dua unsur golongan masyarakat yang berdiam di wilayah Propinsi Lampung.
3. Aksara Lampung berbunyi: " LAMPUNG "
4. Daun dan Buah lada: Daun =17, Buah Lada 8, Lada merupakan produk utama penduduk asli sejak masa lampau sehingga Lampung dikenal bangsa-bangsa Asia dan bangsa-bangsa Barat. Biji lada 64, Menunjukkan bahwa terbentuknya Dati I Lampung tahun 1964.
5. Setangkai Padi: Buah padi 45. Padi merupakan produk utama penduduk migrasi sehingga terjadilah kehidupan bersama saling mengisi antara dua unsur golongan masyarakat sehingga terwujudnya Negara RI yang Diproklamirkan 17-08-1945.
6. Laduk: Golok masyarakat serba guna.
7. Payam: Tumbak pusaka tradisional.
8. Gung / Gong: Sebagai alat inti seni budaya, sebagai pemberitahuan karya besar dimulai, dan sebagai alat menghimpun masyarakat untuk bermusyawarah.
9. Siger: Mahkota perlambang keagungan adat budaya dan tingkat kehidupan terhormat.
10. Payung: Jari payung 17, bagian ruas tepi 8, garis batas ruas 19, dan rumbai payung 45. Artinya payung agung yang melambangkan Negara RI Proklamasi 17-08-1945 dan sebagai payung jurai yang melambangkan Propinsi Lampung tempat semua jurai berlindung. Tiang dan bulatan puncak payung: satu cita membangun Bangsa dan Negara RI dengan Ridho Tuhan Yang Maha Esa.
11. Warna :
 - a. Hijau = dataran tinggi yang subur untuk tanamam keras dan tanaman musim.
 - b. Coklat = Dataran rendah yang subur untuk sawah dan ladang.
 - c. Biru = Kekayan sungai dan lautan yang merupakan sumber perikanan dan kehidupan para Nelayan.
 - d. Putih = Kesucian dan keikhlasan hati masyarakat.

- e. Kuning (tua, emas dan muda) =keagungan dan kejayaan serta kebesaran cita masyarakat untuk membangun daerah dan Negaranya.

3.4 Lokasi

Alamat lengkap instansi KESBANGPOL : JL. Basuki Rahmat No. 21, Gedung Pakuon, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211



Gambar 3.2 Kantor KESBANGPOL Provinsi Lampung

3.4.1. Gambaran Umum Bagian Bidang Bina Ideologi dan Wawasan

Kebangsaan

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.
- Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.

- Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:

- 1 Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- 2 Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

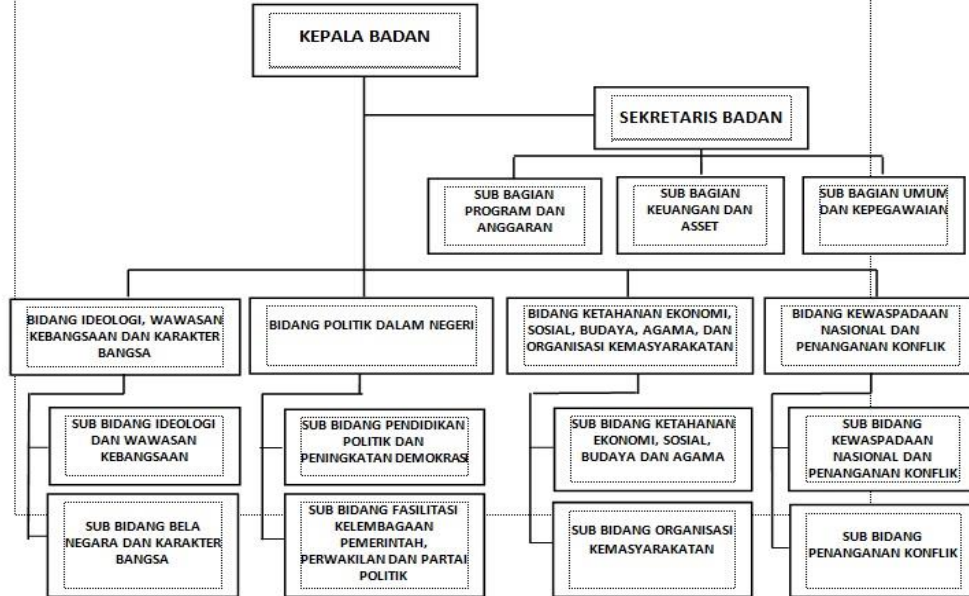
3.4.2. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 56 Tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

(Pergub Lampung Nomor : 56 Tahun 2019)



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dalam tugas akhir “Fungsi Kehumasan Dalam Pelaksanaan Program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila” Pada Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung” dapat disimpulkan bahwa:

Fungsi kehumasan yang dilakukan oleh Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi kepada publik, memfasilitasi pemahaman publik terhadap tujuan organisasi dengan komunikasi dua arah, dan menjadi mediator dalam pengambilan keputusan terhadap permasalahan publiknya. Dalam melakukan fungsi kehumasan ini, Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung tidak memiliki divisi khusus kehumasan.

Meski begitu, Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung memiliki program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila” yang dirancang oleh salah satu divisi dari beberapa bidang yang dimiliki Badan KESBANGPOL yaitu Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa. Program tersebut merupakan program besar tahunan yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman, penghayatan, dan penerapan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, yang terkandung dalam Pancasila, sebagai landasan moral, etika, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam program ini Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung menerapkan beberapa fungsi kehumasan seperti menunjukan tim atau koordinator khusus yang bertanggung jawab terhadap atas kegiatan ini, pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi yang relevan terhadap masyarakat seperti instagram dan website, kampanye edukasi dan penyuluhan seperti seminar serta kunjungan sekolah, Kegiatan partisipatif dan interaktif seperti diskusi kelompok, kemudian pemanfaatan jaringan dan kemitraan seperti institusi pendidikan.

Dalam hal ini, Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung tetap menjalankan beberapa fungsi kehumasan tanpa adanya divisi khusus kehumasan yang dapat

memberikan pengaruh besar terhadap tujuan dan keberhasilan dari program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila” untuk masyarakat Provinsi Lampung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung mengenai fungsi kehumasan dalam pelaksanaan program “Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila” maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Dengan mengakui dan memahami kekurangan-kekurangan seperti kurangnya fokus dan koordinasi, epektifitas komunikasi yang rendah, keterbatasan dalam manajemen krisis, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, kurangnya pemantauan dan evaluasi, dan pengembangan program yang terbatas , Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung dapat mempertimbangkan untuk memperkuat fungsi kehumasan mereka, baik dengan membentuk divisi khusus atau dengan mengalokasikan sumber daya dan pelatihan yang memadai untuk memastikan fungsi kehumasan berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Rosda.
- Cutlip, S., Center, A., & Broom, G. 2011. *Effectife Public Relations*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ruslan, Rosady. 2014. *Managemen Public Relation dan Media Komunikasi Konsep dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdurrachman, Oemi. 1986. *Dasar-dasar Public Relations*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Lattimore. 2010. *Public Relations, Profesi dan Praktik*. Salemba Humanika.
- Moore, Fraizer, 2004, *Humas: Membangun Citra dengan Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Grunig, J.E. & T. Hunt. 1984. *Managing Public Relations*. Fort Worth: Holt, Rinchart & Winston.
- Hifni, Alifahmi. 2005. *Sinergi Integrasi Iklan, Komunikasi, Public Relations, Pemasaran dan Promosi*, Bandung: Mizan Media Utama.
- Elvinaro, Ardianto. 2011. *Handbook of Public Relations, Pengantar Komprehensif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rachmadi, F., 1992, *Public Relations-dalam Teori dan Praktek*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jurnal

- Lubis, E., E. 2012. Peran Humas Dalam Membentuk Citra Pemerintah. *Jurnal Ilmu Admisitrasi Negara*, 12(1), 1-73.
- Aziz, V., & Rohmat. 2022. Strategi, Peran dan Fungsi Kehumasan di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal El-Hamra: Kependidikan dan Kemasyarakatan*, 7(1), 46-59.
- Purwindra, M., B. 2016. Peran Humas Badan Pusat Statistik Sebagai Pengelola Manajemen Reputasi di Era Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 71-82.

Website

- Sejarah Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung
<https://kesbangpol.lampungprov.go.id/> Diakses Pada 14 Maret 2023 Pukul 13.30.

Visi dan Misi Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung

<https://kesbangpol.lampungprov.go.id/> Diakses Pada 14 Maret 2023
Pukul 14.00.